



Jumat, 12 Februari 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan kesiapannya menyelenggarakan Pilkades serentak meskipun anggaran yang tersedia masih kurang. Pemkab Pasuruan akan berupaya memenuhi kekurangan anggaran melalui Perubahan APBD tahun 2021 atau mencari sumber dana lain. Tahapan Pilkades akan dimulai pada Juli 2021 dan puncaknya akan berlangsung pada November 2021. Pemkab Pasuruan akan memanfaatkan anggaran yang tersedia dan

mengalokasikan kekurangannya di APBD Perubahan 2021 atau menggunakan cara lain.

Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah menunda kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan. Anggaran dari kegiatan yang ditunda tersebut akan dialihkan untuk menutupi kekurangan penyelenggaraan Pilkades. Hal ini dilakukan untuk memastikan Pilkades tetap terlaksana sesuai rencana.

Kekurangan anggaran Pilkades mencapai Rp 4 miliar. Hal ini disebabkan kebijakan baru pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkades dan penambahan TPS karena pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemilihan kepala desa cukup dilakukan di satu TPS, namun kini setiap desa bisa memiliki lebih dari dua TPS.

Pemkab Pasuruan akan terus mencari solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran Pilkades. Mereka berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan Pilkades serentak berjalan lancar dan sukses, meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Upaya ini penting dilakukan untuk menjamin proses demokrasi di tingkat desa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas.